



PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUNAN DAN TRIWULANAN
(REVISI)**

2019

**Nomor : S-2655/PW10/6/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung
Telepon (022) 6015108 Faksimile (022) 6032096
E-mail : jabar@bpkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
(REVISI)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyana
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Iswan Elmi
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

Iswan Elmi
NIP 19600127 198102 1 001

Pihak Pertama



Mulyana
NIP 19621122 198302 1 001

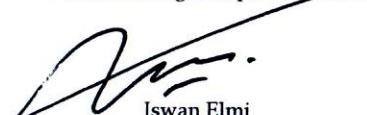
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 (REVISI)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	70
	1.2 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik *)	%	75
	1.3 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	%	60
	1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	56
	1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	62
2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	60
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	75
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80
	2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	80
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	55
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	70
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100
	6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0
	6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	67
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	33
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100
	7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0
	7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	85
	7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	15
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	93
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	181
3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	12

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
4.	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16
5.	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6
6.	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	laporan	73
7.	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	laporan	68
A Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	skala 1-10	8
B Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	28
2.	Termanfaatkannya Aset secara Optimal	2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP	m2	170
		2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	unit	8
		2.3 Tersedianya Inventaris Rumah Tangga BPKP	unit	4
		2.4 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	m2	634

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp. 11.556.352.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp. 40.408.801.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Rp. 939.180.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP	Rp. 1.037.749.000,00
Jumlah	Rp. 53.942.082.000,00

Pelaksana Tugas Kepala BPKP



Iswan Elmi
NIP 19600127 198102 1 001

*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN

Jakarta, 30 Agustus 2019

Kepala Perwakilan,




Mulyana
NIP 19621122 198302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2019 (REVISI)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

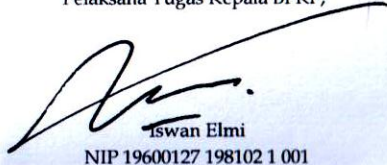
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
		Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program						
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	2	5	23	70	70
	1.2 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik *)	%	0	70	70	75	75
	1.3 Persentase BUMN/ Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	%	0	0	0	60	60
	1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	0	30	45	56	56
	1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	0	0	30	62	62
2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	10	20	40	60	60
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	10	25	50	75	75
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	10	25	45	70	70
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	40	80	80
	2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	40	80	80
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	0	0	40	80	80
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	0	10	30	55	55
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	0	0	30	70	70
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100	100	100
	6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	0	0	0	0
	6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	52	63	67	67	67
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	15	22	30	33	33
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	0	0	100	100	100
	7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	0	0
	7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	11	33	59	85	85
	7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	15	15

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	0	15	44	34	93	
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	32	55	40	54	181	
3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	0	0	0	12	12	
4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	4	4	4	4	16	
5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	0	0	6	0	6	
6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	laporan	3	11	36	23	73	
7. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	laporan	7	1	23	37	68	
A Sasaran Program	Indikator Kinerja Program							
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	skala 1-10	0	0	0	8	8	
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan							
1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	7	7	7	7	28	
2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal	2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP	m2	0	0	170	0	170	
	2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	unit	0	2	6	0	8	
	2.4 Tersedianya Inventaris Rumah Tangga BPKP	unit	0	4	0	0	4	
	2.5 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	m2	0	0	634	0	634	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
		Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		3	4	5	6	7	8
1.	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp	3.568.529.000	2.559.418.000	3.000.000.000	2.428.405.000	11.556.352.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp	8.551.114.000	11.887.858.000	11.211.695.000	8.758.134.000	40.408.801.000
3.	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp	124.418.000	264.566.000	272.433.000	277.763.000	939.180.000
4.	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp	0	76.534.000	787.888.000	173.327.000	1.037.749.000
	Jumlah	Rp	12.244.061.000	14.788.376.000	15.272.016.000	11.637.629.000	53.942.082.000

Jakarta, 30 Agustus 2019


Pelaksana Tugas Kepala BPKP,


 Iswan Elmi
 NIP 19600127 198102 1 001

*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN

Kepala Perwakilan,




 Mulyana
 NIP 19621122 198302 1 001